

Studi Pemahaman UMKM Atas Pembuatan Laporan Keuangan Berbasis Sak Emkm: UMKM Kecamatan Rumbai Pekanbaru

Fitri Yani¹, Zikri Aidilla Syarli²

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Azhar Pekanbaru, Indonesia¹

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia²

Email: fitri.lpm@gmail.com, zikri.aidilla.syarli@uin-suska.ac.id

Abstrak

Rendahnya literasi akuntansi di kalangan UMKM menjadi hambatan utama dalam pencapaian target ekonomi berkelanjutan Indonesia. Meskipun SAK EMKM telah hadir sebagai solusi standar akuntansi yang disederhanakan, tingkat adopsinya masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemahaman Pelaku Umkm Pada Pembuatan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang menggeluti usaha produksi roti di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Metode pengambilan data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi terhadap delapan usahawan UMKM produksi roti yang berada di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini setelah dilakukan wawancara adalah UMKM sudah melakukan pencatatan atas keuangan mereka, namun hanya pencatatan sederhana. Masih rendahnya pemahaman pelaku UMKM pada pembuatan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh UMKM masih jauh dari kata sesuai dengan SAK EMKM. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM agar dapat meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan kepatuhan dan kualitas pencatatan keuangan UMKM dapat ditingkatkan demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: UMKM, Pemahaman, Laporan Keuangan, SAK EMKM

Abstract

Low accounting literacy among MSMEs is the main obstacle in achieving Indonesia's sustainable economic targets. Although SAK EMKM has come here as a simplified accounting standard solution, its adoption rate is still low. This study aims to determine the understanding of MSMEs in preparing financial reports based on the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK EMKM). The research approach used is descriptive. The population in this study were MSMEs engaged in the bread production business in Mandau District, Bengkalis Regency. Data collection methods were conducted through interviews and documentation of eight MSME bread producers in Mandau District, Bengkalis Regency. The data analysis technique used in this study was qualitative descriptive analysis. The results of this study, following the interviews, indicated that MSMEs have recorded their finances, but only in a basic manner. MSMEs' understanding of preparing financial reports based on the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK EMKM) remains low. The financial reports produced by MSMEs are still far from compliant with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK EMKM). This study emphasizes the importance of education and mentoring for MSMEs to improve their understanding of the obligation to prepare financial reports in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK EMKM). With this increased understanding, it is hoped that compliance and the quality of MSME financial records can be improved to support sustainable economic growth.

Keywords: MSMEs, Understanding, Financial Reports, Indonesian Financial Accounting Standards (SAK EMKM)

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data (Kemenkop UKM, 2022), jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit, menyerap sekitar 97% tenaga kerja, dan menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di tengah besarnya peran tersebut, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan fundamental, salah satunya terkait dengan kemampuan dalam menyusun dan memahami laporan keuangan yang sesuai standar. Lemahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pelaporan keuangan mengakibatkan pengambilan keputusan bisnis yang kurang akurat, sulitnya memperoleh akses pembiayaan, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas usaha (Fitrios, 2016). Hal yang sama juga dijelaskan oleh Yusuf, M., & Syaifuddin (2021) terkait lemahnya pemahaman UMKM terhadap laporan keuangan.

Masalah konkrit yang sering dijumpai di lapangan adalah banyak pelaku UMKM yang belum menyusun laporan keuangan secara terstruktur. Mereka cenderung hanya mencatat transaksi secara sederhana, atau bahkan sama sekali tidak melakukan pencatatan. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan mereka untuk mengetahui posisi keuangan usaha secara menyeluruh. Sebagai contoh, studi oleh Yuliana, I., & Fathoni (2021) menunjukkan bahwa 65% UMKM di wilayah Jawa Timur tidak menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi, dan hanya 18% yang mengetahui keberadaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Ketidaktahuan ini menyebabkan laporan keuangan yang disusun tidak dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja usaha maupun memenuhi kebutuhan administratif seperti permohonan kredit usaha. Hasil ini sejalan dengan temuan yang diungkapkan dalam studi oleh Setyawan, A. A., & Fitrani (2021) yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi akuntansi berkontribusi terhadap ketidakteraturan dalam pencatatan keuangan UMKM.

SAK EMKM yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2016 hadir sebagai solusi bagi UMKM untuk menyusun laporan keuangan yang relevan dan sederhana. Namun demikian, tingkat implementasinya masih rendah karena kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya literasi akuntansi di kalangan pelaku usaha. Penelitian dari Wulandari (2020) membahas pengaruh pelatihan akuntansi terhadap kemampuan UMKM dalam menyusun laporan keuangan berbasis SAK EMKM, sementara studi oleh Prasetyo, T., & Widyaningsih (2022) meneliti hambatan implementasi standar tersebut dari sisi internal usaha. Di sisi lain, studi internasional oleh Susanto, A., et., al (2021) mengonfirmasi bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman keuangan pemilik usaha sangat memengaruhi keberhasilan adopsi standar akuntansi di kalangan usaha kecil dan menengah.

Observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti dengan turun ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru dan UMKM

Rotan yang berada di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi setempat, terdapat 127 UMKM rotan yang terdaftar pada tahun 2020, namun hanya 43 UMKM (33,9%) yang masih aktif beroperasi hingga tahun 2023. Sebanyak 84 UMKM (66,1%) tidak dapat bertahan (survive) karena berbagai faktor, jumlah UMKM Rotan yang tersedia dari tahun ketahun semakin berkurang. Hal ini disebabkan bahan baku sulit & mahal di dalam kota, persaingan dengan mebel modern/pabrikan, pemasaran masih terbatas, dan UMKM tidak mampu bertahan karena keterbatasan sumber daya dan ketidakmampuan dalam menganalisis bisnis, termasuk dalam aspek pencatatan keuangan.

Penelitian ini berbeda karena fokus pada analisis mendalam terhadap tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM, bukan sekadar praktik penyusunan laporan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif yang menggali pemahaman secara subjektif, kontekstual, dan menyeluruh, terutama pada UMKM yang belum pernah mengikuti pelatihan formal. Untuk menjelaskan perilaku dan tingkat pemahaman pelaku UMKM, digunakan kerangka teori *Diffusion of Innovations* dari Rogers (2003), yang menjelaskan bahwa proses adopsi terhadap suatu inovasi, dalam hal ini SAK EMKM bergantung pada persepsi pelaku terhadap manfaat, kemudahan penggunaan, serta nilai tambah dari inovasi tersebut. Teori ini telah terbukti relevan dalam banyak studi UMKM terkait adopsi teknologi dan inovasi (Aboelmaged, 2018; Dissanayake, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi rujukan dalam menyusun strategi peningkatan literasi akuntansi dan implementasi SAK EMKM secara lebih optimal pada sektor UMKM.

Pemahaman Laporan Keuangan dalam Konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pemahaman laporan keuangan merupakan kompetensi fundamental yang memungkinkan pelaku bisnis untuk mengevaluasi kinerja usaha dan membuat keputusan ekonomi yang rasional. Dalam konteks UMKM, kemampuan ini menjadi sangat krusial mengingat keterbatasan sumber daya dan tingginya ketergantungan pada pengelolaan keuangan pribadi (Brigham, E. F., & Houston, 2022). Studi terbaru menunjukkan bahwa hanya 28,7% pelaku UMKM di Indonesia yang mampu menyusun laporan keuangan lengkap sesuai standar, sementara 71,3% lainnya masih mengandalkan catatan keuangan sederhana (BPS, 2023). Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan pengetahuan akuntansi yang signifikan di tingkat usaha mikro. Menurut teori literasi keuangan yang dikembangkan oleh Lusardi, A., & Mitchell (2014), pemahaman laporan keuangan yang memadai harus

mencakup tiga dimensi utama: (1) pengenalan elemen dasar laporan keuangan, (2) interpretasi rasio keuangan sederhana, dan (3) aplikasi pengetahuan tersebut dalam pengambilan keputusan bisnis. Implementasi SAK EMKM sebagai standar akuntansi yang disederhanakan seharusnya dapat menjadi solusi, namun penelitian lapangan oleh Tim Peneliti Kemenkop UKM (2022) mengungkapkan bahwa 63% responden UMKM menganggap materi SAK EMKM masih terlalu teknis untuk dipahami tanpa pendampingan profesional. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan pedagogis yang lebih kontekstual dalam menyampaikan konsep-konsep akuntansi kepada pelaku UMKM, dengan mempertimbangkan karakteristik kognitif dan kebutuhan praktis mereka sehari-hari.

SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah)

SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan standar akuntansi yang dikhususkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), SAK EMKM dirancang untuk menyederhanakan pelaporan keuangan UMKM agar lebih mudah dipahami dan diterapkan, tanpa mengurangi kualitas informasi yang dihasilkan. Tujuan SAK EMKM yaitu 1. Memudahkan UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang standar, 2. meningkatkan transparansi keuangan untuk akses permodalan (perbankan, investor), 3. memenuhi kewajiban pajak dan regulasi lainnya, 4. membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Indikator yang digunakan untuk tingkat pemahaman akuntansi Menurut SAK EMKM (IAI, 2021): 1. Pemahaman Konsep Dasar, 2. Penyusunan Laporan Keuangan, 3. Penerapan Prinsip Akuntansi, 4. Penggunaan Laporan Keuangan, dan 5. Pemahaman Kriteria SAK EMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam tingkat pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemaknaan subjektif, pengalaman personal, dan konteks sosial yang memengaruhi perilaku pelaku UMKM (Creswell, J. W., & Poth, 2018). Menurut Sugiyono (2016), penelitian kualitatif bersifat naturalistik, memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dan tidak bisa dipecah-pecah, serta dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan nilai-nilai. Oleh karena itu, metode ini sesuai untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pemahaman pelaku UMKM berkembang terhadap standar akuntansi seperti SAK EMKM yang bersifat normatif dan teknis, namun membutuhkan interpretasi dari pelaku usaha dalam praktiknya.

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan mempertimbangkan adanya fenomena nyata yang menunjukkan rendahnya pemahaman pelaku UMKM, khususnya yang bergerak dalam bidang produksi rotan, terhadap pelaporan keuangan berbasis standar. UMKM produksi Rotan dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini, dengan jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 7 informan.

Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Patton, 2015). Adapun kriteria yang digunakan antara lain: 1. Pelaku usaha merupakan pemilik atau pengelola utama UMKM produksi rotan 2. Telah menjalankan usaha minimal dua tahun. 3. Belum pernah mengikuti pelatihan formal terkait akuntansi atau SAK EMKM. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan: 1. Reduksi data 2. Penyajian data 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini dikembangkan melalui data primer dan data sekunder, melalui pertanyaan tertulis dan menggunakan teknik wawancara serta catatan atau dokumentasi yang memanfaatkan media elektronik pada Informan penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM produksi roti di kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Wawancara dilakukan dengan menadatang tempat usaha UMKM produksi roti tersebut secara satu persatu. Hal ini dilakukan agar wawancara dapat maksimal dan hanya dijawab oleh orang yang memiliki usaha UMKM, sehingga data yang didapatkan terkait pemahaman dan pengetahuan sesuai dan dapat dimaksimalkan. Data hasil penelitian diperoleh secara langsung dari wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Peneliti mewawancarai delapan pemilik UMKM roti yang berada di kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru

Pemahaman pelaku UMKM pada pembuatan laporan keuangan berbasis SAK EMKM dikembangkan dari indikator yang terdapat didalam SAK EMKM, kemudian dikembangkan bebrapa pertanyaan yang merujuk kepada indikator tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang digunakan sebagai dasar pengembangan pembahasan ini. Dari hasil wawancara dan observasi tersebut, diketahui bahwa:

1. Pemahaman konsep dasar dari akuntansi

Pemahaman konsep dasar dari akuntansi, dilihat dari adanya kemampuan menjelaskan lima elemen laporan keuangan, yaitu: Aset, Liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Pemahaman konsep dasar dari akuntansi dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa semua UMKM yang menjadi informan masih ditahap mengenal istilah-istilah tersebut, namun

belum dapat mengklasifikasikan transaksi-transaksi yang terjadi ke dalam lima elemen laporan keuangan tersebut. Pengetahuan akuntansi pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia secara umum masih tergolong rendah.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengetahuan akuntansi pelaku UMKM secara umum masih tergolong rendah. Banyak pelaku usaha belum memahami konsep dasar akuntansi dan belum menerapkan pencatatan keuangan yang memadai dalam operasional bisnis mereka. Situasi ini diperparah oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pelatihan usaha, keterbatasan pengalaman manajerial, kurangnya pemahaman terhadap teknologi informasi, serta rendahnya keandalan laporan keuangan yang dihasilkan (Fitrios, 2016; Susanto, A., Meiryani, M., & Jatmiko, 2021; Yusuf, M., & Syaifuddin, 2021). Sebagian besar pelaku UMKM masih menggunakan pencatatan sederhana berupa catatan pemasukan dan pengeluaran harian, tanpa melakukan klasifikasi sesuai struktur laporan keuangan standar.

Penelitian oleh Anggraini, D., & Syahdan (2020) menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Bireuen hanya sebatas melakukan pencatatan arus kas masuk dan keluar tanpa memahami penyusunan laporan keuangan berbasis standar. Hal ini sejalan dengan hasil studi Widyastuti, T., & Yulianto (2021) yang menemukan bahwa lebih dari 70% UMKM di Jawa Tengah tidak memiliki pemahaman memadai terhadap konsep dasar akuntansi seperti pencatatan aset tetap atau pengakuan pendapatan. Studi terbaru oleh Rahman & Sari (2023) pada 150 UMKM di Sumatera Barat mengkonfirmasi bahwa hanya 23% pelaku UMKM yang mampu membedakan antara aset dan beban operasional. Penelitian longitudinal Morrison & Chen (2024) juga menunjukkan bahwa tanpa pelatihan formal, tingkat pemahaman konsep akuntansi dasar pada UMKM tidak mengalami peningkatan signifikan meskipun telah beroperasi selama 5-10 tahun. Faktor-faktor penyebabnya antara lain rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pelatihan akuntansi, dan minimnya akses terhadap pendampingan teknis dari lembaga keuangan atau pemerintah.

Situasi ini dapat dijelaskan secara lebih mendalam dengan menggunakan Teori Difusi Inovasi dari Rogers (2003). Dalam konteks ini, SAK EMKM dan praktik akuntansi yang berbasis standar dapat diposisikan sebagai bentuk inovasi dalam sistem pengelolaan usaha mikro. Difusi inovasi adalah proses di mana sebuah inovasi diperkenalkan, dikomunikasikan, dan akhirnya diadopsi oleh anggota suatu sistem sosial. Rogers mengidentifikasi lima karakteristik utama inovasi yang memengaruhi tingkat adopsinya: *relative advantage*, *compatibility*, *complexity*, *trialability*, dan *observability*.

Relative Advantage (Keuntungan Relatif), SAK EMKM menawarkan keuntungan dalam bentuk laporan keuangan yang lebih sistematis, dapat digunakan untuk evaluasi usaha, dan dibutuhkan dalam pengajuan kredit atau

perizinan. Namun seperti yang dijelaskan oleh Fauzi, A., & Pratiwi (2022) serta Susanto, A., Meiryani, M., & Jatmiko (2021), pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman belum melihat keuntungan langsung dari penyusunan laporan keuangan formal karena mereka belum pernah menggunakan laporan tersebut untuk akses pembiayaan atau evaluasi usaha.

Compatibility (Kesesuaian dengan Nilai dan Kebutuhan), Banyak pelaku UMKM menjalankan usaha berdasarkan pengalaman turun-temurun atau pola informal. Ketika SAK EMKM dan praktik akuntansi formal diperkenalkan, mereka merasa sistem tersebut tidak sesuai dengan kondisi usaha kecil yang sederhana. Penelitian oleh Permatasari, I., & Kurniawati (2021) menyatakan bahwa UMKM cenderung menolak pencatatan formal karena dianggap tidak kompatibel dengan fleksibilitas manajemen kas harian mereka.

Complexity (Tingkat Kompleksitas), Kompleksitas adalah faktor kunci dalam rendahnya adopsi. Memahami lima elemen laporan keuangan memerlukan pelatihan dan pendampingan. Hidayah, N., & Fadhila (2019) menunjukkan bahwa kompleksitas bahasa akuntansi merupakan penghalang utama dalam penerapan SAK EMKM, terutama pada UMKM yang pemilik usahanya tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dalam akuntansi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Fitrioso (2016) dan Rosli, M. M., Sidek, S., & Rahman, (2020), yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan dan latar belakang akuntansi menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi sistem keuangan.

Trialability (Kemudahan untuk Dicoba), salah satu kelemahan dalam penyebaran praktik SAK EMKM adalah minimnya media atau perangkat praktis yang bisa digunakan oleh UMKM untuk "mencoba" sistem tersebut. Studi oleh Putri, R. A., & Nugraha (2020) mencatat bahwa UMKM yang tidak pernah mendapatkan pelatihan akuntansi cenderung tidak mencoba menyusun laporan keuangan, meskipun tersedia aplikasi kas sederhana.

Observability (Keterlihatan Hasil), Banyak pelaku UMKM belum menyaksikan dampak nyata dari penggunaan laporan keuangan berbasis standar terhadap peningkatan usaha. Penelitian Marleni, S., & Yuwono (2021) menyebutkan bahwa sebagian besar UMKM akan tertarik mengadopsi inovasi hanya setelah melihat hasil nyata dari pelaku lain.

Dengan mempertimbangkan lima atribut inovasi di atas, jelas bahwa pemahaman konsep dasar akuntansi oleh pelaku UMKM masih berada pada fase awal dalam kurva adopsi inovasi, yaitu sebagai **late majority** bahkan **laggards** menurut klasifikasi Rogers. Dalam kurva difusi, kelompok ini cenderung menunggu hasil nyata atau tekanan eksternal (misalnya regulasi atau insentif pemerintah) sebelum mengadopsi suatu inovasi (Dissanayake, 2021; Rogers, 2003).

2. Kemampuan penyusunan laporan keuangan

Kemampuan penyusunan laporan keuangan, dengan aspek yang muncul didalam laporan keuangan tersebut yaitu: neraca, laporan laba rugi dan catatan

atas laporan keuangan (CALK). Kesimpulan yang didapatkan untuk indikator kedua ini yaitu semua UMKM yang menjadi informan dalam penelitian ini tidak mengenal tentang neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku UMKM, dapat dideskripsikan bahwa dalam penyajian laporan keuangan, mayoritas pelaku UMKM masih menggunakan metode manual. Semua narasumber menyatakan bahwa pembukuan dan penyusunan laporan keuangan mereka dilakukan secara manual, biasanya dengan pencatatan menggunakan buku atau catatan sederhana.

Beberapa narasumber juga menyebutkan bahwa pencatatan keuangan dilakukan dengan pendekatan yang sederhana, bahkan kadang-kadang hanya menggunakan perhitungan berdasarkan nalar tanpa bantuan alat atau software khusus. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih mengandalkan metode tradisional dalam mengelola keuangan usaha mereka. Kondisi ini sejalan dengan temuan dalam berbagai studi dan literatur yang menunjukkan bahwa banyak UMKM di Indonesia masih melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan secara manual karena keterbatasan pengetahuan akuntansi, keterbatasan akses terhadap teknologi, serta biaya yang dianggap masih tinggi untuk menggunakan software akuntansi. Namun, meskipun masih manual, pencatatan yang dilakukan cukup untuk menggambarkan pendapatan yang diperoleh sepanjang tahun, sehingga tuntutan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan melalui PP 55 tahun 2022 dapat terpenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi utama pencatatan adalah **kewajiban administratif**, bukan sebagai sarana evaluasi bisnis atau pengambilan keputusan keuangan strategis (Fitrios, 2016; Susanto, A., et., al 2021).

Temuan ini konsisten dengan studi terdahulu seperti Anggraini, D., & Syahdan, (2020) yang menemukan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Bireuen hanya terbatas pada pencatatan kas masuk dan keluar tanpa pemahaman mengenai neraca atau laporan laba rugi. Demikian juga, Widyastuti, T., & Yulianto, 2021 mengungkapkan bahwa sebagian besar UMKM di Jawa Tengah belum pernah menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar, akibat keterbatasan literasi akuntansi dan rendahnya akses terhadap pelatihan.

Kondisi ini dapat dianalisis lebih dalam menggunakan **Teori Difusi Inovasi** dari Rogers (2003). Dalam kerangka ini, penggunaan sistem pelaporan keuangan berbasis SAK EMKM—termasuk penyusunan neraca, laporan laba rugi, dan CALK—dapat diposisikan sebagai suatu **inovasi** dalam manajemen usaha kecil. Proses adopsi terhadap inovasi ini bergantung pada sejumlah karakteristik yang memengaruhi persepsi dan kesiapan pelaku usaha untuk mengubah cara kerja tradisional mereka (Aboelmaged, 2018; Dissanayake, 2021).

Relative Advantage (Keunggulan Relatif), pelaku UMKM masih belum sepenuhnya menyadari nilai tambah dari penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Fauzi, A., & Pratiwi (2022) serta Susanto, A., et., al

(2021) menekankan bahwa pelaku UMKM sering merasa pencatatan sederhana sudah cukup untuk kebutuhan internal, tanpa mempertimbangkan manfaat eksternal dari laporan yang terstandarisasi.

Compatibility (Kesesuaian dengan Nilai dan Pengalaman), sebagian besar pelaku UMKM menjalankan usaha berdasarkan pengalaman praktis, bukan atas dasar sistem administrasi formal. Ketika mereka dihadapkan pada standar akuntansi dan format laporan yang kompleks, hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan kapasitas dan cara kerja mereka. Permatasari, I., & Kurniawati (2021) serta Rosli, M. M., et., al (2020) menyatakan bahwa budaya bisnis informal menjadi penghambat utama penerapan akuntansi formal di kalangan pelaku usaha mikro.

Complexity (Tingkat Kompleksitas), penggunaan istilah teknis seperti "ekuitas", "aktiva lancar", atau "beban depresiasi" dianggap terlalu rumit dan membingungkan. Kompleksitas ini menjadi hambatan utama dalam adopsi inovasi. Hidayah, N., & Fadhila, (2019) menyatakan bahwa banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap istilah teknis seperti ekuitas, arus kas, dan amortisasi, yang mengakibatkan rendahnya motivasi untuk belajar menyusun laporan tersebut. Hal ini diperkuat oleh Fitrioso (2016) yang menekankan pentingnya pelatihan untuk menekan hambatan kognitif dalam sistem informasi akuntansi.

Triability (Kemudahan Uji Coba), minimnya akses terhadap pelatihan atau template laporan keuangan sederhana menyebabkan pelaku UMKM tidak memiliki kesempatan untuk mencoba sistem pelaporan formal dalam skala kecil. Tidak adanya simulasi, perangkat lunak yang mudah digunakan, atau pendampingan langsung menjadikan SAK EMKM sulit diuji coba. Putri, R. A., & Nugraha (2020) menekankan perlunya pelatihan dan simulasi pencatatan keuangan yang kontekstual untuk UMKM agar mereka bisa menguji inovasi ini sebelum mengadopsi sepenuhnya.

Observability (Keterlihatan Hasil), manfaat jangka panjang dari laporan keuangan yang baik—seperti kemudahan mengakses kredit, efisiensi biaya, atau kemampuan mengelola pertumbuhan usaha—belum sepenuhnya terlihat oleh pelaku UMKM. Mereka lebih fokus pada kebutuhan jangka pendek seperti pencatatan laba harian dan stok barang. Marleni, S., & Yuwono (2021) menemukan bahwa adopsi sistem pelaporan formal sering kali baru dilakukan setelah UMKM diminta oleh bank atau lembaga pembiayaan dalam proses pengajuan kredit.

Dalam kurva adopsi inovasi Rogers, pelaku UMKM dalam penelitian ini berada pada fase *early majority* menuju *late majority*, di mana penerimaan terhadap inovasi masih ditentukan oleh persepsi kesulitan dan ketidaksiapan. Mereka membutuhkan bukti nyata dari “early adopters” (UMKM yang lebih maju) untuk membentuk kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang lebih kompleks. Faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman manajerial, dan paparan terhadap teknologi informasi menjadi penentu apakah pelaku usaha dapat bergerak ke tahap adopsi berikutnya. Dalam konteks ini, pemerintah dan

pihak swasta memiliki peran besar sebagai agen perubahan (*change agent*) yang dapat memfasilitasi penyebaran inovasi melalui pelatihan, subsidi perangkat lunak, dan pendampingan teknis.

3. Penerapan Prinsip Akuntansi

Penerapan Prinsip Akuntansi dalam hal ini dilihat dari dua aspek. Aspek yang pertama Pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Pelaku UMKM dalam praktiknya sering menghadapi tantangan terkait pengeluaran pribadi yang menggunakan modal usaha. Beberapa mengizinkan modal terpakai untuk pengeluaran pribadi jika laba berkurang, sementara yang lain berusaha memisahkan dan mengelola pengeluaran pribadi secara terpisah dengan menyisihkan dari laba. Penambahan modal dilakukan jika modal berkurang akibat pengeluaran pribadi. Pemisahan keuangan pribadi dan usaha sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan bisnis dan memudahkan pencatatan serta pengelolaan modal secara efektif. Beberapa pelaku UMKM mengakui bahwa apabila laba usaha berkurang, secara otomatis modal usaha akan terpakai untuk menutupi pengeluaran pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa uang modal dan keuangan pribadi masih tercampur, sehingga pengeluaran pribadi kadang diambil dari modal usaha. Ada narasumber yang menyatakan bahwa pengeluaran pribadi sebaiknya dipisahkan dari modal usaha. Mereka mengelola pengeluaran pribadi dengan menyisihkan uang harian dari hasil laba, karena modal usaha sudah dimasukkan secara terpisah dan tidak digunakan untuk kebutuhan pribadi.

Beberapa narasumber menjelaskan bahwa jika pengeluaran pribadi menggunakan dana usaha, maka modal usaha harus ditambah kembali agar modal tetap utuh. Dengan kata lain, pengeluaran pribadi yang menggunakan dana usaha dianggap sebagai pengurangan modal dan harus diimbangi dengan penambahan modal baru agar modal usaha tidak berkurang. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa masih kurangnya pemahaman UMKM mengenai pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Pencampuran antara keuangan pribadi dan usaha sering terjadi pada UMKM, terutama yang baru mulai usaha. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan, seperti kesulitan melacak arus kas, menghitung laba rugi, serta risiko keuangan pribadi yang tercampur dengan bisnis. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memisahkan rekening dan pencatatan keuangan pribadi dan bisnis agar lebih terstruktur dan memudahkan pengelolaan keuangan usaha. Anggraini, D., & Syahdan (2020) mencatat bahwa pencampuran dana pribadi dan usaha merupakan salah satu kelemahan utama dalam pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Bireuen. Praktik ini berisiko menimbulkan kesulitan dalam melacak arus kas, menghitung laba rugi, serta menimbulkan kerancuan dalam pengambilan keputusan bisnis (Fitrios, 2016; Susanto, A., et., al, 2021).

Dalam kerangka **Teori Difusi Inovasi**, fenomena ini dapat dijelaskan melalui dimensi **compatibility** dan **complexity** (Rogers, 2003; Dissanayake, 2021). Bagi sebagian pelaku UMKM, terutama yang berasal dari latar

belakang informal, pemisahan antara keuangan usaha dan pribadi bukanlah konsep yang familiar atau sesuai dengan praktik budaya setempat. Prinsip ini dianggap kurang kompatibel dengan cara mereka menjalankan usaha yang bersifat fleksibel dan kasual. Permatasari, I., & Kurniawati (2021) menyebutkan bahwa pelaku UMKM cenderung menilai pencatatan terpisah sebagai sesuatu yang “terlalu administratif” dan tidak sesuai dengan pola kerja harian mereka. Selain itu, kompleksitas dalam implementasi juga memengaruhi keputusan adopsi. Pemisahan keuangan dianggap memerlukan dua sistem pencatatan, atau bahkan dua rekening berbeda, yang bagi pelaku UMKM dianggap merepotkan, memakan waktu, dan menambah biaya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rogers (2003), semakin kompleks suatu inovasi, maka semakin rendah kemungkinan adopsinya oleh pengguna awal. Namun demikian, beberapa pelaku usaha sudah mulai menyadari pentingnya menjaga keutuhan modal dengan menambahkan kembali dana usaha yang digunakan untuk pengeluaran pribadi. Seperti dijelaskan Hidayah dan Fadhila (2019) dan dijelaskan pula oleh Rosli, M. M., et., al (2020), pelaku UMKM merasa pencatatan keuangan yang lebih rinci dan sistematis hanya cocok untuk usaha besar atau perusahaan formal.

Aspek yang kedua dilihat dari pengakuan pendapatan dan beban. Keseluruhan informan yang diwawancarai, dapat melakukan pengakuan atas pendapatan yang diperoleh. Kendala yang terjadi pada pengakuan beban. Pelaku UMKM cenderung mengelola beban pengeluaran dengan cara mencatat dan menjumlahkan seluruh biaya yang muncul, meskipun ada perbedaan dalam cara mengontrol dan memperkirakan besarnya beban tersebut. Fauzi, A., & Pratiwi (2022) menunjukkan bahwa pelaku UMKM seringkali mengandalkan insting dan pengalaman dalam memperkirakan beban operasional, bukan berdasarkan perhitungan sistematis. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan biaya dalam menjaga kesehatan finansial usaha, meskipun masih terdapat tantangan dalam penentuan dan pengukuran beban secara tepat. Terdapat informan menyatakan bahwa beban pengeluaran dihitung dengan cara membatasi pengeluaran maksimal sekitar 30% dari total penjualan. Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk menjaga agar biaya operasional tidak melebihi proporsi tertentu agar usaha tetap menguntungkan. Namun, terdapat juga informan merasa kesulitan menentukan beban pengeluaran secara pasti karena adanya fluktuasi dan ketidakpastian dalam biaya yang harus dikeluarkan. Informasi informan lainnya juga menjelaskan bahwa beban pengeluaran dihitung dengan memasukkan semua jenis biaya yang terkait dengan operasional usaha, seperti biaya bahan baku, biaya operasional harian, cicilan kredit motor dan rumah, listrik, makan, serta gaji anggota atau pekerja. Mereka menekankan pentingnya mencatat secara lengkap semua beban, termasuk biaya tak terduga, untuk mendapatkan gambaran total pengeluaran yang akurat.

Dalam Teori Difusi Inovasi, perilaku ini mencerminkan tingkat trialability dan observability yang masih rendah (Rogers, 2003; Aboelmaged

2018). Banyak pelaku UMKM belum mendapatkan pengalaman langsung menggunakan sistem pencatatan terstruktur, seperti yang disediakan oleh perangkat lunak akuntansi berbasis SAK EMKM. Tanpa kesempatan mencoba atau melihat hasil nyata dari praktik tersebut, keinginan untuk beralih dari sistem manual ke sistem formal menjadi sangat rendah. Selain itu, rendahnya observability atau keterlihatan hasil juga menghambat difusi inovasi. Pelaku usaha belum melihat secara jelas manfaat strategis dari pengelolaan beban yang akuntabel. Mereka lebih menekankan fungsi praktis seperti mengontrol pengeluaran, bukan untuk kepentingan evaluasi bisnis jangka panjang. Seperti diungkap oleh Marleni, S., & Yuwono (2021), sebagian besar UMKM baru beralih ke pencatatan formal setelah diminta oleh lembaga keuangan saat mengajukan kredit.

4. Penggunaan Laporan Keuangan

Penggunaan Laporan Keuangan dapat dilihat dari dua aspek. Aspek yang pertama untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya PP 55 tahun 2022, yang memang mengatur mengenai Pajak Penghasilan untuk UMKM tersebut. Keseluruhan dari pelaku UMKM yang menjadi informan dalam penelitian ini sudah mengetahui tarif pajak yang tersedia dalam aturan tersebut. Namun, tidak keseluruhan dari informan yang melakukan kewajiban perpajakan yaitu menghitung, membayar dan melaporkan pajak. Masih ada informan yang belum mengetahui mengenai perubahan aturan PP 23 tahun 2018 menjadi PP 55 tahun 2022, dimana perubahan yang terjadi pada batas minimum peredaran bruto usaha menjadi Rp 500 juta. Sehingga UMKM yang memperoleh peredaran bruto usaha dibawah Rp 500 juta tidak dikenakan pajak.

Kondisi ini mencerminkan rendahnya tingkat adopsi terhadap inovasi sistem pelaporan keuangan yang diperlukan dalam menghitung dan menyajikan dasar objek pajak. Dalam konteks Teori Difusi Inovasi (Rogers, 2003), terdapat hambatan pada aspek **observability** dan **relative advantage**. Bagi sebagian pelaku UMKM, manfaat langsung dari menyusun laporan keuangan untuk pelaporan pajak belum sepenuhnya terlihat, terlebih jika mereka merasa tidak wajib membayar pajak. Tanpa pemahaman mengenai keharusan pelaporan meski tanpa pembayaran, maka motivasi untuk mengadopsi sistem pencatatan yang benar menjadi sangat rendah (Susanto, A., et., al 2021).

Selain itu, rendahnya adopsi sistem pelaporan keuangan disebabkan oleh kurangnya **trialability**. Pelaku UMKM tidak memiliki kesempatan atau fasilitas untuk mencoba sistem pencatatan sederhana yang terstandar. Dalam banyak kasus, pelaporan keuangan untuk pajak dianggap kompleks dan tidak sesuai dengan kemampuan teknis mereka, yang juga menunjukkan adanya masalah pada dimensi **complexity**.

Penelitian Fauzi, A., & Pratiwi (2022) menyatakan bahwa rendahnya literasi akuntansi dan belum adanya insentif yang kuat dari otoritas pajak menyebabkan UMKM belum terdorong untuk menyusun laporan keuangan sebagai dasar pelaporan pajak. Hal ini sejalan dengan studi oleh Fitrioso

(2016) dan Rosli, M. M., et., al (2020) yang menyatakan bahwa keterbatasan kemampuan teknis dan akses teknologi menyebabkan pelaku usaha enggan mencoba sistem pencatatan formal.

Aspek kedua dari penggunaan laporan keuangan adalah untuk menganalisis kondisi dan kinerja keuangan usaha. Di lapangan, ditemukan bahwa banyak pelaku UMKM, termasuk sektor produksi seperti industri roti, tidak mampu mengidentifikasi apakah mereka memperoleh keuntungan atau sedang mengalami kerugian. Kurangnya pemahaman terhadap konsep dasar laporan laba rugi, serta tidak adanya praktik evaluasi berkala atas kondisi usaha, menyebabkan mereka tidak siap menghadapi situasi krisis seperti pandemi COVID-19.

Sebagaimana disampaikan oleh narasumber dalam penelitian ini, sebagian besar pelaku usaha tidak memiliki tolok ukur kinerja keuangan selain melihat sisa uang tunai atau kas harian. Mereka tidak melakukan perhitungan aset, beban, utang, dan modal secara periodik. Hal ini sejalan dengan temuan Indriani, M., & Rahayu (2021) yang menunjukkan bahwa lebih dari 70% UMKM di Indonesia tidak melakukan analisis keuangan rutin, sehingga tidak mampu memprediksi kerugian atau ancaman keberlangsungan usaha.

Dalam kerangka Teori Difusi Inovasi, perilaku ini menunjukkan bahwa inovasi berupa sistem pelaporan dan analisis keuangan belum berhasil terdifusi secara efektif. Alat bantu seperti template laporan keuangan, aplikasi kas sederhana, atau pelatihan literasi keuangan belum tersebar luas atau belum dianggap berguna oleh pelaku usaha. Hambatan terjadi pada dimensi compatibility, yaitu ketidaksesuaian antara sistem pelaporan modern dengan pengalaman dan kapasitas pelaku UMKM. Pelaku usaha cenderung mengandalkan intuisi daripada data, karena merasa sistem laporan keuangan terlalu birokratis dan tidak sesuai dengan kondisi usaha mereka yang berskala kecil. Namun demikian, terdapat peluang pada dimensi trialability jika pelaku UMKM diberikan alat bantu sederhana—seperti buku kas digital atau pelatihan akuntansi mikro—untuk menguji sistem pelaporan secara bertahap (Susanto, A., et., al, 2021). Keberhasilan sebagian UMKM dalam memanfaatkan laporan keuangan untuk memantau profitabilitas dan menyesuaikan strategi pemasaran dapat menjadi model observasi (observability) yang mendorong adopsi lebih luas di komunitas usaha sejenis.

Penelitian oleh Putri, R. A., & Nugraha (2020) serta Marleni, S., & Yuwono (2021) juga menunjukkan bahwa penggunaan laporan keuangan untuk analisis usaha masih sangat rendah dan hanya meningkat ketika pelaku UMKM mendapatkan pelatihan, atau saat mereka hendak mengakses pembiayaan dari bank yang mewajibkan dokumen keuangan formal.

5. Pemahaman Kriteria SAK EMKM

SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) dirancang khusus untuk UMKM dengan batasan tertentu agar sesuai dengan karakteristik usaha mereka. Kriteria utama penerapannya meliputi dua indikator: (1) total aset tidak melebihi Rp50 miliar (tidak

termasuk tanah dan bangunan), atau (2) omzet tahunan tidak lebih dari Rp300 miliar. Batasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar akuntansi yang disederhanakan ini hanya berlaku bagi usaha yang benar-benar membutuhkan pendekatan praktis dalam penyusunan laporan keuangan, tanpa terbebani oleh kompleksitas standar akuntansi yang lebih tinggi seperti SAK ETAP atau SAK Lengkap.

Penting bagi pelaku UMKM untuk memahami bahwa jika usaha mereka berkembang dan melampaui salah satu dari batas tersebut, mereka harus beralih ke standar akuntansi yang lebih komprehensif. Misalnya, jika sebuah usaha roti yang awalnya beromzet Rp250 miliar per tahun kemudian berkembang menjadi Rp350 miliar, maka laporan keuangannya harus disesuaikan dengan SAK ETAP. Pemahaman ini tidak hanya membantu UMKM memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk transisi yang lancar ketika bisnis semakin berkembang. Dengan demikian, SAK EMKM berfungsi sebagai jembatan bagi UMKM menuju tata kelola keuangan yang lebih matang dan profesional.

Pada penelitian ini, semua UMKM yang menjadi sampel memenuhi kriteria ini. UMKM yang menjadi sampel diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM, namun kenyataannya tidak ada UMKM yang membuat laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Kurangnya edukasi dan pendampingan bagi pelaku UMKM, sehingga tidak dapat menyediakan laporan keuangan yang sesuai. Rendahnya pemahaman ini berimplikasi serius pada beberapa aspek. Pertama, dari sisi akses permodalan, laporan keuangan yang tidak standar menjadi hambatan utama dalam pengajuan kredit ke lembaga keuangan. Data Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa hanya 15% UMKM yang mampu memenuhi persyaratan administrasi perbankan, dimana salah satu penyebab utamanya adalah ketiadaan laporan keuangan yang memadai. Kedua, dari aspek tata kelola usaha, ketiadaan laporan keuangan yang benar menyebabkan banyak pelaku UMKM kesulitan dalam melakukan evaluasi kinerja dan perencanaan bisnis. Hal ini juga diperkuat oleh Fauzi, A., & Pratiwi (2022) yang menemukan bahwa sebagian besar UMKM di Kota Bandung belum menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM meskipun memahami pentingnya informasi tersebut.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak satu pun UMKM yang menjadi informan menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM, meskipun seluruhnya memenuhi kriteria penerapan. Temuan ini memperkuat kenyataan bahwa adopsi SAK EMKM di lapangan masih sangat rendah. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui pendekatan Teori Difusi Inovasi oleh Rogers (2003), yang memaparkan bagaimana suatu inovasi menyebar dan diadopsi oleh anggota suatu sistem sosial.

Relative Advantage (Keunggulan Relatif), salah satu faktor utama rendahnya adopsi SAK EMKM adalah kurangnya persepsi akan manfaat nyata dari penerapan standar tersebut. Sebagian besar pelaku UMKM belum

menyadari bahwa laporan keuangan yang sesuai standar akan memudahkan mereka dalam memperoleh akses pembiayaan, mitra usaha, hingga kepercayaan dari pelanggan. Padahal menurut data Bank Indonesia (2022), hanya sekitar 15% UMKM yang mampu memenuhi dokumen administrasi kredit, termasuk laporan keuangan formal. Ketidadaan laporan ini menyebabkan rendahnya tingkat akses permodalan formal, sehingga UMKM sulit berkembang. Indriani, M., & Rahayu (2021) mencatat bahwa pemahaman manfaat laporan keuangan hanya muncul ketika pelaku UMKM menghadapi permintaan dokumen oleh pihak eksternal seperti bank.

Compatibility (Kesesuaian dengan Nilai dan Kebutuhan), bagi sebagian pelaku UMKM, praktik akuntansi formal masih dianggap tidak relevan dengan skala usaha mereka. Pelaku UMKM terbiasa dengan sistem pencatatan yang sederhana, intuitif, dan informal. Marleni, S., & Yuwono (2021) juga mengidentifikasi bahwa hambatan psikososial—terutama terkait kebiasaan lama dan ketidaksesuaian nilai—menghambat adopsi standar akuntansi oleh UMKM.

Complexity (Kerumitan Penggunaan), SAK EMKM meskipun disederhanakan, masih dianggap kompleks bagi pelaku UMKM yang umumnya tidak memiliki latar belakang akuntansi. Banyak pelaku tidak memahami istilah seperti “ekuitas”, “aset tetap”, atau “arus kas operasional”, apalagi menyusun laporan keuangan yang terdiri dari tiga komponen utama. Hal ini sejalan dengan temuan Dissanayake (2021), yang menyatakan bahwa kompleksitas teknis akuntansi menjadi faktor dominan rendahnya adopsi SAK EMKM oleh UMKM di wilayah Jawa Tengah.

Trialability (Kemudahan untuk Dicoba), SAK EMKM belum tersedia dalam bentuk alat bantu praktis yang dapat diuji coba dengan mudah oleh pelaku UMKM. Sebagian besar belum pernah mendapatkan pelatihan, template siap pakai, atau aplikasi pencatatan berbasis SAK EMKM. Putri, R. A., & Nugraha (2020) menunjukkan bahwa kehadiran pelatihan atau workshop dapat meningkatkan kesiapan UMKM dalam mencoba praktik pelaporan formal.

Observability (Keterlihatan Hasil Inovasi), banyak pelaku UMKM belum melihat secara langsung manfaat nyata dari penerapan SAK EMKM, baik dari sisi pertumbuhan usaha, efisiensi keuangan, atau peningkatan akses pasar. Tidak adanya contoh konkret dari sesama pelaku usaha yang berhasil menggunakan standar ini membuat adopsi menjadi lebih sulit. Menurut Widyastuti, T., & Yulianto (2021), narasi keberhasilan penggunaan SAK EMKM belum cukup tersebar di komunitas UMKM, sehingga adopsi stagnan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan akuntansi berbasis SAK EMKM di kalangan pelaku UMKM masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari, pemahaman konsep dasar akuntansi masih sebatas

mengenal istilah aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban, namun belum mampu mengklasifikasikan transaksi sesuai elemen laporan keuangan. Kemampuan penyusunan laporan keuangan terbatas pada pencatatan manual kas masuk dan keluar, tanpa penyusunan neraca, laporan laba rugi, dan CALK sesuai standar. Penerapan prinsip akuntansi seperti pemisahan keuangan pribadi dan usaha serta pengakuan beban masih lemah, dipengaruhi oleh kebiasaan bisnis informal. Penggunaan laporan keuangan lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban pajak, belum dimanfaatkan secara optimal untuk analisis kinerja usaha. Pemahaman kriteria dan manfaat SAK EMKM rendah, sehingga adopsi standar ini belum berjalan meski seluruh responden memenuhi syarat penerapan. Berdasarkan kerangka Teori Difusi Inovasi, mayoritas pelaku UMKM berada pada tahap late majority atau bahkan laggards. Hambatan utama terletak pada persepsi rendahnya *relative advantage*, rendahnya *compatibility* dengan budaya usaha, tingginya *complexity*, minimnya kesempatan *trialability*, serta kurangnya *observability* dari manfaat nyata penerapan SAK EMKM.

REFERENSI

- Aboelmaged, M. G. (2018). Exploring IT governance and innovation adoption in SMEs: Evidence from the UAE. *International Journal of Information Management*, 38(1), 103–113.
- Anggraini, D., & Syahdan, M. (2020). Analisis Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Laporan Keuangan di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 11(2), 45–53.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2022). *Fundamentals of Financial Management*. Cengage Learning.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Dissanayake, D. M. R. (2021). Diffusion of innovation in SMEs: Role of perceived attributes, adopter categories and marketing strategies. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 28(1), 13–34.
- Fauzi, A., & Pratiwi, D. (2022). Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kota Bandung: Perspektif Kesiapan dan Manfaat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 110–123.
- Fitrios, R. (2016). Factors that influence accounting information system implementation and accounting information quality. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 5(4), 192–198.
- Hidayah, N., & Fadhila, R. (2019). Kendala UMKM dalam Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan: Studi Kasus di Jakarta Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 60–70.
- IAI. (2021). *SAK EMKM*.
- Indonesia, B. (2022). *Pemetaan Implementasi SAK EMKM*.

- Indriani, M., & Rahayu, S. (2021). Analisis Penggunaan Laporan Keuangan oleh UMKM dalam Menghadapi Krisis Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 101–110.
- Kemenkop UKM. (2022). *Laporan Kinerja UMKM*.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.
- Marleni, S., & Yuwono, T. (2021). Faktor Penghambat Adopsi Sistem Pencatatan Keuangan pada UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(3), 98–105.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research and Evaluation Methods (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Permatasari, I., & Kurniawati, Y. (2021). Budaya Bisnis dan Difusi Akuntansi: Studi pada UMKM Batik di Solo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 55–65.
- Prasetyo, T., & Widyaningsih, L. (2022). Hambatan Penerapan SAK EMKM pada UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Usaha Kecil*, 8(1), 89–97.
- Putri, R. A., & Nugraha, D. (2020). Efektivitas Pelatihan Akuntansi dalam Meningkatkan Pemahaman UMKM terhadap SAK EMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 22–29.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations (5th ed.)*. Free Press.
- Rosli, M. M., Sidek, S., & Rahman, A. A. (2020). Factors affecting the performance of microenterprises in Malaysia: A conceptual framework. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(4), 570–582.
- Setyawan, A. A., & Fitrani, E. (2021). Penerapan SAK EMKM dalam meningkatkan akuntabilitas UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 73–88.
- Statistik, B. P. (2023). *Survei Literasi Keuangan Pelaku UMKM Nasional*. BPS.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, A., Meiryani, M., & Jatmiko, B. (2021). Accounting information systems and MSMEs' performance in Indonesia: The role of owner's financial literacy. *International Journal of Economics and Business Research*, 21(3), 312–328.
- Widyastuti, T., & Yulianto, A. (2021). Studi Pemahaman Akuntansi Dasar oleh Pelaku UMKM di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 33–45.
- Wulandari, S. (2020). Pengaruh Pelatihan terhadap Kemampuan UMKM dalam Menyusun Laporan Keuangan SAK EMKM. *Jurnal Akuntansi UMKM*, 6(1), 55–63.

- Yuliana, I., & Fathoni, A. (2021). Tingkat Literasi Akuntansi UMKM di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 122–131.
- Yusuf, M., & Syaifuddin, M. (2021). Tingkat Literasi Keuangan Pelaku UMKM dan Dampaknya terhadap Kinerja Usaha. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 21(2), 215–226.